UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

———. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

———. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

———. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

———. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Peranginangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1986.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1952.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Salim HS, H. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana, 2010.

Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung: Eresco, 1977.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1984.

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Jurnal Ilmiah

Christianto, Hwian. "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-46, no. 1 (Januari-Maret 2016): 8-9.

Prawira, I. G. B. Y., dan Gusti Bagus Yoga. "Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Ius* 4, no. 1 (2016): 64–78.

Romana, Prancisca, et al. "Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait Di Pengadilan Negeri Di Surakarta)." *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 117–25.

Yudara, N.G. "Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Autentik." Makalah disampaikan di Jakarta, 8 Juni 2001.

C. Skripsi/Tesis

Gandawidjaja, Yanly. Peran Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2002.

Wijaya, Dwi Julianto. Peran PPAT dalam Pensertipikatan Tanah Milik Adat di Kabupaten Cirebon. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

———. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104).

———. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Beserta perubahannya dalam UU No. 28 Tahun 2007 dan UU No. 7 Tahun 2021).

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757).

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59).

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5893).

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

———. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Direktorat Jenderal Pajak. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP)*.

Pemerintah Kota Bandung. *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

E. Sumber Internet

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018*. Diakses 10 Januari 2026. https://ppid.bandung.go.id/storage/ppid_pembantu/informasi_berkala/EsycOnNGWPf3OooEjkhadv6cbEtFBaMjWpe2I94V.pdf.

DetikNews. "Perusahaan di Bandung Ini Diketahui Pakai Bukti Pembayaran PBB Palsu." *Detik.com*. Diakses dari situs web Detik.

Indra, Krisna. “Pengertian Sanksi Pajak.” *Kumpulan Materi Pengetahuan Umum*. Diakses 4 Maret 2025.http://materipengetahuanumum.blogspot.com/2016/10/pengertian-sanksi-pajak.html.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Karunia, Tria. "Syarat Sahnya Perjanjian." *Jurnal Hukum*. Diakses 10 Maret 2026. http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/.

Tesis Hukum. "Pengertian Perlindungan Hukum." Diakses 18 Desember 2016. http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/.

F. Wawancara

Bapak A dan Bapak B (Nama disamarkan). Wawancara oleh Penulis. Kota Bandung, 20 Mei 2025.

Franciska Wira dan Alin Ardinal Widjaksana . Wawancara Oleh Penulis. Kota Bandung, 21 Mei 2025

Ibu C (Nama disamarkan). Wawancara oleh Penulis. Kota Bandung, 28 Mei 2025.

PPAT Q, R, S, X, Y, dan Z. Wawancara oleh Penulis. Kota Bandung, 21 Mei 2025.